

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, serta menekan ketimpangan antarprovinsi. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi tersebut harus diikuti stabilitas nasional yang dinamis, tingginya pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang merata dimana ini biasa disebut Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru. Trilogi Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, karena dengan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, perekonomian akan tumbuh tinggi dan pemerataan pembangunan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

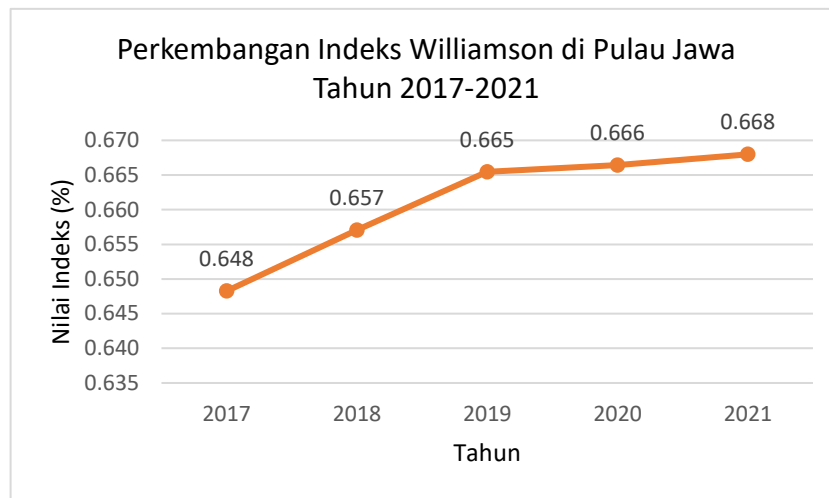
Ketika memutuskan strategi pembangunan fundamental untuk ekonomi, ketidaksepakatan selalu muncul mengenai apakah pertumbuhan ekonomi atau pemerataan yang harus didahulukan. Meskipun tingginya pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai strategi pembangunan ekonomi yang fundamental. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak selalu menjamin pemerataan pembangunan ekonomi antarprovinsi. tidak adanya pemerataan ekonomi dapat menciptakan gelombang kemiskinan di masyarakat. hal tersebut adalah problem utama yang dihadapi berbagai negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Permasalahan ini

dianggap semakin rumit karena diantara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ekonomi dirasa begitu penting tapi sulit untuk mewujudkan keduanya di waktu yang bersamaan.

Kondisi demografi dan kandungan sumber daya alam yang berbeda di setiap daerah merupakan akar utama penyebab ketimpangan. Sehingga, kemampuan suatu daerah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi berbeda sebagai akibat dari perbedaan ini. Oleh karena itu, biasanya tidak mengherankan jika terdapat daerah yang maju (*developed region*) dan daerah tertinggal (*underdeveloped region*) di suatu wilayah.

Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2012:136). Dampak negatif dari ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan antarprovinsi (*regional disparity*) muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ketimpangan wilayah dapat diketahui dengan menggunakan penghitungan indeks Williamson yang meneliti hubungan ketimpangan regional dan pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga di perhitungan indeks Williamson ini yang menjadi indikator utama adalah pendapatan per kapita. Ketimpangan antarprovinsi di Pulau Jawa masih cukup tinggi satu sama lain.



Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik)

**Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Sepanjang tahun 2017-2021 ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Hal ini di buktikan dengan data pada gambar 1.1 dimana grafik nilai indeks Williamson terus meningkat, dari nilai indeks 0.648 pada tahun 2017 menjadi 0.668 pada tahun 2021. Nilai indeks ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Jawa lebih besar dari 0.4 dan lebih kecil dari 0.69 yang artinya ketimpangan wilayah antarprovinsi di Pulau Jawa masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun masuk dalam kategori ketimpangan sedang, jika melihat kecenderungan grafik yang terus meningkat tiap tahunnya tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah adalah nilai PDRB per kapita, semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa

semakin besar nilai PDRB per kapita suatu daerah semakin sejahtera penduduk daerah tersebut.



Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik)

**Gambar 1.2 Perkembangan PDRB per kapita antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Perkembangan PDRB per kapita antarprovinsi selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbedaan mencolok antara PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta dengan lima Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Nilai PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar Rp. 174.941.72 sedangkan di tahun yang sama nilai PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat hanya sebesar Rp. 30.907.59, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 27.144.18, Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp. 30.907.59, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 40.821.89 dan PDRB per kapita Provinsi Banten sebesar Rp. 38.217.80. Hal ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa belum merata. PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta jauh lebih besar dari PDRB per kapita lima Provinsi lainnya, yang

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta jauh lebih baik.

Pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan. Adanya pemerataan ekonomi membuat ketimpangan antar wilayah semakin menyempit. Ketimpangan wilayah di negara berkembang telah menjadi perhatian utama dalam merancang dan menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Perhatian ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kebijakan pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan tanpa dibarengi dengan pemerataan telah mengakibatkan ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa.

Kuznet dalam Asryad (2010) menerangkan dalam parameter tertentu, pembangunan sebuah negara dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Menurut analisis Kuznet, ada hubungan yang bentuknya seperti "U terbalik" diantara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan serta tingkat pendapatan per kapitanya. Artinya distribusi pendapatan pada tahap awal pertumbuhannya cenderung buruk, namun di tahap selanjutnya akan berangsur membaik bersamaan dengan pendapatan per kapita.

PDRB per kapita suatu daerah menggambarkan kemampuan sebagian besar penduduk untuk mencukupi keperluan dasarnya. Indikator kesejahteraan yang bersumber dari pemerataan pendapatan di suatu wilayah salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pendapatan per kapita didapat dari PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduknya, nilai PDRB per kapita suatu daerah dapat menurun disebabkan tingginya jumlah penduduk. Pemerintah pusat

dan daerah perlu mengendalikan jumlah penduduk agar tidak terjadi pertambahan jumlah penduduk secara drastis.



Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik)

**Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Perkembangan jumlah penduduk antarprovinsi selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbedaan mencolok antara jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk Provinsi Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Tiga Provinsi di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga Provinsi lainnya. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk lebih dari 36 juta jiwa sedangkan tiga Provinsi lainnya yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta di tahun yang sama memiliki jumlah penduduk kurang dari 13 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita penduduk, Ketika pertambahan jumlah penduduk suatu daerah tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di daerah tersebut. Akan tetapi, peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja maka akan mendorong dan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat di dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan dan akan menjadikan perluasan pasar. Perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya dan semakin memperlebar ketimpangan antar wilayah.

Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2012) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BKPM (Realisasi Investasi Menurut Provinsi)

**Gambar 1.4 Perkembangan Investasi antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan investasi antarprovinsi di Pulau Jawa selama kurun waktu lima tahun terakhir. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan nilai realisasi investasi tertinggi kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta di posisi kedua, Provinsi Jawa Timur di posisi ketiga. Sedangkan Provinsi Banten dan Jawa Tengah mengalami fluktuasi realisasi investasi dan Provinsi DI Yogyakarta menjadi Provinsi dengan nilai realisasi investasi terkecil. Lima Provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat sedangkan Provinsi DI Yogyakarta tidak mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan.



Investasi termasuk suatu aspek penting pada pembangunan ekonomi sebab memiliki hubungan dengan kelangsungan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Penyebabnya adalah kenaikan produksi barang atau jasa yang selanjutnya membuat angkatan kerja terserap. Pada akhirnya tenaga kerja tersebut mendapat upah dan memiliki kemampuan dalam melakukan pembelian. Semakin banyak investasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang dan jasa dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak maka pendapatan per kapita akan merata.

Tetapi sebaliknya, semakin sedikit investasi yang masuk ke suatu daerah maka proses produksi barang dan jasa dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih sedikit membuat pendapatan per kapita masyarakat kecil dan kemampuan daya beli masyarakat rendah, sehingga dapat menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan antar wilayah.

Investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, investasi yang besar umumnya akan berbanding terbalik dengan jumlah orang menganggur. Ini disebabkan jika investasi meningkat maka akan berimplikasi pada tenaga kerja yang terserap juga meningkat.



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS (diolah)

**Gambar 1.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Secara keseluruhan dari tahun 2017-2019 tingkat pengangguran terbuka seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021. Peningkatan ini terjadi tidak terlepas dari dampak adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tiga Provinsi di Pulau Jawa memiliki TPT cukup tinggi jika dibandingkan dengan tiga Provinsi lainnya. Tiga Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta juga termasuk kedalam Provinsi dengan TPT lebih tinggi dari rata-rata TPT Nasional. Sedangkan tiga Provinsi lainnya memiliki TPT lebih rendah, Provinsi yang dimaksud yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

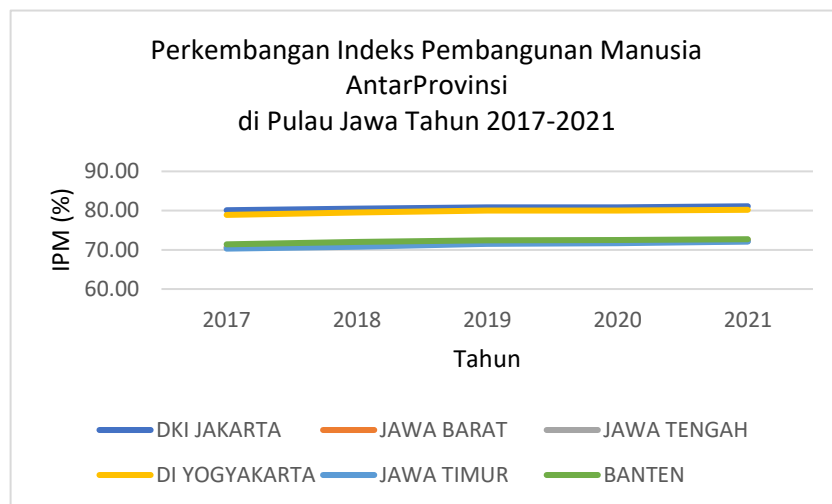
Tingkat pengangguran terbuka suatu daerah mengisyaratkan seperti apa keadaan tenaga kerja di daerah tersebut (Rose & Sovita, 2016). Jika tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah tinggi maka menandakan terdapat aspek

produksi yang sampai saat ini tidak dipergunakan secara holistik guna mendukung pembangunan. Partisipasi angkatan kerja dan PDRB per kapita yang rendah di suatu wilayah akan mengakibatkan semakin rendahnya kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan serta meningkatkan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya semakin memperparah ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu wilayah atau negara.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu pada bidang kesehatan berupa umur harapan hidup, pendidikan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak. Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam pembangunan daerah. Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan yang tinggi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang memiliki pendidikan rendah, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan

mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi atau menghasilkan output yang tinggi.



Sumber: BPS (Berita Resmi Statistik)

**Gambar 1.6 Perkembangan IPM antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**

Pembangunan manusia menurut provinsi di Pulau Jawa terus membaik, hal ini di buktikan dengan data pada gambar 1.6 dimana grafik memperlihatkan kecenderungan peningkatan IPM selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sejak tahun 2017 IPM seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa terus meningkat, Indeks yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pembangunan manusia telah membaik, sedangkan indeks yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan manusia telah memburuk. Oleh karena itu, semakin baiknya kualitas sumber daya manusia akan mendorong kesejahteraan dan mempersempit ketimpangan antarprovinsi.

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, untuk mengetahui ketimpangan wilayah serta bagaimana pengaruh PDRB per kapita, jumlah penduduk, investasi, TPT dan IPM terhadap ketimpangan antarprovinsi di Pulau Jawa. Maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita, Jumlah Penduduk, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan di latar belakang, adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan wilayah di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa Tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan wilayah di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa Tahun 2010-2021.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapannya dapat bermanfaat atau berguna secara akademis berbentuk sumber informasi, terkhusus bagi kajian teoritis sejenis terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita, jumlah penduduk, investasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan antarprovinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk melengkapi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan.
2. Menjadi pedoman bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.